

Patriarki Berkedok Tubuh Perempuan: Sebuah Analisis Feminis

Sopian Tamrin

Universitas Negeri Makassar

*Corresponding author, e-mail: sopiantamrin@unm.ac.id.

Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik tidak bisa lagi jadi ukuran emansipasi. Lebih jauh daripada itu perlu ada penelusuran mendalam terkait latar belakang keluarga dan aktivisme serta kontribusi mereka pada isu kesetaraan perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk menyingkap praktik patriarki berkedok tubuh perempuan dalam dunia politik. Fenomena tersebut kemudian akan dianalisis dengan teori feminisme. Tulisan ini merupakan jenis kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan data diperoleh melalui kegiatan observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di ruang publik dengan fokus pada kemunculan kandidat perempuan di daerah Sulawesi selatan khususnya dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Sedangkan dokumentasi dilakukan dari berbagai sumber seperti data KPU dan berita media massa baik cetak maupun online terkait calon-calon perempuan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dalam kerangka feminis. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar perempuan yang muncul dalam kontestasi politik adalah kerabat penguasa atau pengusaha di wilayah Sulawesi selatan. Mereka juga tidak memiliki belakang aktivisme yang menunjukkan rekam jejak kepedulian dan perjuangan terkait isu dan masalah perempuan. Eksistensi mereka karena adanya nama besar keluarga di bekalangnya, seperti; istri, anak, saudara, menantu, atau ponakan dari pejabat atau pemilik modal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa munculnya perempuan dalam dunia politik tidak lain adalah perpanjangan tangan dari kelompok dominan (laki-laki) dalam upaya melanggengkan kekuasaannya.

Kata Kunci: Feminisme; Patriarkalisme; Perempuan; Politik.

Abstract

The involvement of women in political contests can no longer serve as a measure of emancipation. Beyond that, there needs to be a thorough exploration of family background, activism, and their contributions to women's equality issues. This paper aims to uncover patriarchal operations disguised within the realm of politics through the female body. This phenomenon will then be analyzed through feminist theory. This writing is of a qualitative descriptive nature. Data were from public spaces with a focus on the emergence of female candidates in the South Sulawesi region, particularly in legislative and regional head elections. Meanwhile, documentation was gathered from various sources such as KPU data and mass media news, both print and online, related to female candidates. The collected data were then analyzed within a feminist framework. This research found that most women who emerge in political contests are relatives of rulers or entrepreneurs in the South Sulawesi region. They also lack a background in activism that demonstrates a track record of concern and advocacy for women's issues and struggles. Their existence is due to the prominent family names they carry, such as wives, children, siblings, in-laws, or nieces of officials or capital owners. Therefore, it can be concluded that the emergence of women in the political arena is nothing but an extension of the dominant group (men) in their efforts to perpetuate their power.

Keywords: Feminism; Patriarchalism; Politics; Womens.

How to Cite: Tamrin, S. (2024). Patriarki Berkedok Tubuh Perempuan: Sebuah Analisis Feminis. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 7(2), 301-310.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

Pendahuluan

Maraknya perempuan yang muncul dalam arena politik menjadi fenomena yang marak saat ini. Berdasarkan data [Badan Pusat Statistik Indonesia \(2022\)](#) bahwa Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI telah menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu, khususnya pada pemilu legislatif. Pada pemilu tahun 1999, jumlah perempuan anggota DPR Indonesia sebanyak 44 orang atau 8,8 persen, sementara pada pemilu tahun 2004, jumlahnya meningkat menjadi 65 orang. Kemudian, pada pemilu tahun 2009, angka tersebut bertambah menjadi 100 orang atau 17,86 persen. Tren peningkatan terus berlanjut, di mana pada pemilu tahun 2014, jumlah perempuan anggota DPR RI mencapai 97 orang (17,22%). Selanjutnya, pada pemilu tahun 2019, jumlahnya kembali meningkat menjadi 120 orang (20,87%) sedangkan pada level DPRD juga mengalami peningkatan dari 25,76 persen pada tahun 2014 menjadi 30,88 persen pada tahun 2019.

Berdasarkan publikasi DCT [KPU Provinsi Sulawesi Selatan \(2023\)](#) terdapat 404 caleg Perempuan terdaftar yang akan memperebutkan 85 kursi di parlemen. Pada periode sebelumnya ada dua puluh tiga (23) Perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Data ini menunjukkan adanya geliat partisipasi perempuan dalam kontestasi politik. Selain itu, hasil observasi peneliti juga melihat kemunculan beberapa kandidat perempuan dalam pemilihan kepala daerah. Fenomena ini tidak terbatas pada level global dan nasional saja melainkan terjadi juga pada level lokal di pedesaan. Secara sepintas fenomena ini bisa saja dipahami sebagai trend penguatan kesadaran gender di tengah masyarakat. Hal ini paling tidak menunjukkan perubahan dalam dinamika politik serta persepsi terhadap peran perempuan dalam ruang politik. Menurut [Wängnerud \(2009\)](#) bahwa perwakilan perempuan dalam politik tidak hanya menjadi cerminan dari kemajuan demokrasi, tetapi juga menunjukkan inklusivitas dan sensitivitas terhadap isu-isu gender.

Keterlibatan perempuan itu karena didukung oleh faktor sosial budaya termasuk agama bahkan keberpihakan undang-undang pada partisipasi perempuan di politik dan pemerintahan ([Lotulung & Mulyana, 2018](#)). Kehadiran perempuan dalam politik, baik sebagai calon legislatif maupun kepala daerah, memang menjadi sebuah fenomena yang semakin terlihat di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, trend ini juga dapat diamati dengan jumlah perempuan yang muncul sebagai calon legislatif dan kepala daerah semakin bertambah dari waktu ke waktu.

Meskipun Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki. Menurut [Anto et al., \(2023\)](#) bahwa dalam masyarakat yang masih didominasi oleh norma-norma patriarki, perempuan sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai posisi politik yang tinggi. Selain itu, hasil observasi peneliti melihat masih ada kecenderungan Masyarakat dalam konstruksi gender tradisional yang menempatkan peran perempuan di dalam rumah tangga. Sehingga perempuan yang ingin terlibat dalam dunia politik cukup sulit karena harus berhadapan dengan berbagai macam stigma dan pemosisian sosial semacam itu.

Partisipasi politik perempuan tidak hanya penting untuk mewujudkan kesetaraan gender, tetapi juga untuk memperkaya representasi politik dengan beragam perspektif dan pengalaman ([Skjeie & Teigen, 2005](#)). Dengan demikian, perubahan ini dapat dianggap sebagai langkah positif menuju pembangunan politik yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Meskipun terjadi peningkatan partisipasi politik perempuan, tantangan-tantangan yang berkaitan dengan gender masih tetap ada. Diskriminasi gender, stereotip, dan hambatan-hambatan struktural lainnya masih menjadi kendala yang harus diatasi bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik.

Pentingnya representasi gender yang merata dalam dunia politik telah menjadi topik signifikan dalam berbagai konteks masyarakat. Menurut [Bari \(2005\)](#) terdapat tren peningkatan yang konsisten dalam partisipasi politik perempuan dan perwakilan mereka di negara-negara maju. Dari dua belas negara yang memiliki keterwakilan perempuan di parlemen lebih dari 33%, sembilan di antaranya termasuk dalam kategori pembangunan manusia yang tinggi. Meskipun terjadi perbaikan, capaian ini masih berada pada tingkat sedang, dan dampaknya terhadap negara-negara dengan indeks pembangunan manusia yang rendah tidak begitu signifikan. Penelitian [Kumar \(2017\)](#) mencatat bahwa banyak negara masih menghadapi tantangan dalam mencapai keterwakilan perempuan yang sebanding dengan partisipasi perempuan di beberapa negara Arab seperti Yaman dan Kuwait, yang memiliki tingkat partisipasi perempuan yang paling rendah di dunia. Di sisi lain, partisipasi perempuan di parlemen negara-negara Nordik seperti Swedia, Islandia, dan Denmark tergolong lebih baik.

Fenomena perwakilan perempuan dalam politik yang menjanjikan ini telah menjadi fokus perhatian dalam banyak penelitian. Menurut [Sidik \(2022\)](#) bahwa affirmative action diperlakukan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Salah satu implementasinya adalah melalui penentuan kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan di kursi parlemen, yang sudah diatur oleh pemerintah. Meskipun keterlibatan perempuan dalam politik dengan memberikan kuota 30%,

masih menjadi wacana kontroversial, begitu pula dengan isu kesetaraan gender lainnya (Trisnani, Windiarti, & Sa'adah, 2021).

Kesetaraan juga mencakup aspek representasi yang seimbang dalam struktur politik. Hal ini berarti bahwa perempuan harus memiliki representasi yang proporsional dalam berbagai lembaga politik, termasuk parlemen, pemerintahan lokal, dan lembaga eksekutif (Barnett & Shalaby, 2024). Pentingnya representasi yang seimbang adalah untuk memastikan bahwa pandangan, kepentingan, dan pengalaman perempuan diakui dan diwakili dalam proses pembuatan keputusan politik, serta untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara, tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Sejumlah penelitian telah memberikan landasan penting bagi pemahaman kita tentang bagaimana kepentingan perempuan terkadang dapat terpinggirkan atau digunakan untuk kepentingan politik yang lebih luas. Misalnya Aulya, Moenta, & Halim (2022) dalam penelitiannya menegaskan meskipun affirmative action telah diatur dalam ketentuan nasional, seperti Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum, implementasinya masih menimbulkan ketidakpastian, ketidakjelasan manfaat, dan ketidakadilan. Penelitian yang dilakukan M. P. Jones (2004) menemukan bahwa pemberian kewajiban partai politik mewajibkan partai politik untuk menempatkan persentase minimal perempuan dalam daftar calon mereka memberikan dampak positif. Bukan hanya itu menurutnya sangat penting mengatur bahwa penempatan perempuan harus berada pada posisi yang dapat dipilih oleh pemilih. Sebaliknya Penelitian Mayrudin, Nurrohman, & Astuti (2022) menunjukkan bahwa masih sedikit kebijakan publik yang mengakomodasi kepentingan perempuan secara memadai. Hal ini disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam partai politik dan perwakilan di parlemen yang cenderung kurang memperhatikan kepentingan perempuan.

Dari berbagai penelitian di atas dan penelitian feminis lainnya masalah Perempuan dilihat pada dua aspek yakni; masalah minimnya partisipasi (representasi) dan hambatan yang dihadapi perempuan untuk masuk dalam arena public. Sedangkan penelitian ini melihat dua aspek tersebut tidak cukup untuk menjelaskan dinamika Perempuan di arena politik. Faktanya beberapa Perempuan bisa tampil dengan mudahnya dalam arena politik. Namun, belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana cara mereka terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyingkap praktik patriarki yang menggunakan tubuh Perempuan dalam melanggengkan kuasa. Penggunaan tubuh yang dimaksud adalah mendorong keterlibatan kerabat Perempuan dalam kontestasi politik, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

Memang perlu dilihat kondisi ini secara kritis agar dapat memahami apakah keterlibatan perempuan dalam politik benar-benar mencerminkan keterwakilan yang substansial dan kualitatif. Hannah Arendt menegaskan bahwa partisipasi dalam urusan politik dianggap sebagai pencapaian tertinggi manusia, karena melibatkan interaksi dialogis, diskusi, dan pertukaran gagasan antara warga masyarakat (Gardiner, 2016). Penelitian Smith (2018) yang berjudul *Women's Political Participation: Breaking Barriers and Building Bridges* bagaimana gerakan feminisme berkontribusi dalam membongkar hambatan terhadap perempuan. Menurut Gerakan feminisme telah berperan dalam membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam politik dan mempengaruhi kebijakan yang lebih inklusif. Walaupun demikian banyak perempuan memegang posisi penting dalam dunia politik tidak menjamin realisasi kebijakan yang inklusif dan ramah terhadap perempuan. Kenyataan ini menguatkan kecurigaan terhadap sisi tersembunyi di balik penampakan politisi perempuan.

Kondisi di atas kemudian menyediakan ruang baru bagi penelitian feminis yang tidak sekedar melihat kehadiran perempuan melainkan membongkar motif tersembunyi. Posisi ini menjadi penting mengingat partisipasi perempuan seringkali dipahami sebagai anging segar gerakan emansipasi. Padahal ini justru bisa lebih berbahaya karena patriarki berkembang sedemikian rupa. Bahkan menampilkan perempuan (termasuk ikhwal simbolisnya) di panggung depan. Berdasarkan gambaran tersebut maka peneliti berupaya menawarkan konstruksi pemikiran feminisme yang baru yakni feminisme fenomenologi. Di mana mencoba untuk menyingkap selubung makna (fenomenologis) di balik figure Perempuan dalam kancah politik. Konsekuensi perspektif kritis feminisme menempatkan Perempuan dalam situasi yang terdominasi. Oleh karena itu, artikel ini akan menyingkap struktur kuasa patriarki dibalik suksesnya Perempuan dalam kontestasi politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena maraknya perempuan yang tampil dalam kontestasi politik khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Penelitian ini berlangsung pada awal tahun 2024 hingga menjelang pilpres dan pileg. Data dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), publikasi media cetak dan digital, serta penelusuran profil politisi perempuan. Metode observasi langsung

memberikan informasi terhadap kenyataan yang muncul di Masyarakat (Sutton & Austin, 2015). Observasi dilakukan di ruang publik dengan fokus pada kemunculan kandidat perempuan di daerah Sulawesi selatan khususnya dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Sedangkan dokumentasi dilakukan dari berbagai sumber seperti data KPU dan berita media massa baik cetak maupun online terkait calon-calon perempuan. Adapun subjek penelitian adalah para kontestan perempuan dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah yang memiliki kekerabatan dengan kekuasaan dan penguasaan. Data perempuan yang dimaksud bisa dilihat kemudian pada tabel 1.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dalam kerangka feminis. Analisis feminisme digunakan untuk melihat kehadiran actor (patriarki) sebagai dalang kontestasi. Kerangka feminis lebih memosisikan Perempuan sebagai korban atau kelompok yang dimanfaatkan daripada sebagai pelaku. Selanjutnya konsep *backstage* (panggung belakang) Erving Goffman digunakan dalam melengkapi analisis aspek fenomenologisnya. Sehingga peneliti memungkinkan untuk menyingkap makna realitas di belakang layar. Dengan mengintegrasikan metode observasi langsung dan pengumpulan data dukung, penelitian ini berusaha memperoleh gambaran yang cukup tentang profil perempuan yang tampil dalam kontestasi politik. Profil tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar analisis dengan perspektif feminis. Melalui analisis tersebut penelitian ini berupaya mengidentifikasi kekuatan yang mendasari partisipasi perempuan dalam politik, terutama penggunaan tubuh Perempuan oleh operasi patriarki. Temuan dan hasil analisis nantinya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman tentang keterlibatan perempuan dalam politik, sekaligus mereproduksi perspektif feminisme yang baru sebagai alat analisis yang relevan dalam konteks sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, peneliti mengkonstruksi perspektif feminis fenomenologi agar bisa membaca kekuatan yang bekerja di balik panggung dan di dukung konsep panggung belakang Erving Goffman.

Hasil dan Pembahasan

Perempuan Dalam Kontestasi Politik

Keterlibatan perempuan dalam politik, penting dipahami dalam konteks sosial historis. Hadirnya perempuan dalam politik tidak hanya mencerminkan perubahan struktural dalam masyarakat, tetapi juga merupakan hasil dari akumulasi perjuangan panjang untuk mengatasi pembatasan tradisional terhadap partisipasi perempuan dalam ranah publik. Sebagai subjek berkesadaran perempuan sudah sepantasnya memperjuangkan hak-hak mereka untuk diakui dan didengar dalam proses pembuatan keputusan politik. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik merupakan suatu kemestian sejarah yang perlu diperjuangkan. Bagaimana tidak jika perempuan sejak lama dikurung dalam ruang domestik. Pemosisian ruang domestik dan pembatasan partisipasi perempuan di arena publik merupakan konstruksi sosial. Proses konstruksi tersebut berlangsung lama oleh kelompok dominan atau dalam hal ini adalah patriarki itu sendiri. Proses konstruksi berlangsung lama tersebut kemudian diinternalisasi dan dipertahankan oleh masyarakat. Pemisahan antara ruang publik yang dianggap sebagai domain laki-laki dan ruang domestik yang dianggap sebagai domain perempuan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari konstruksi sosial tersebut.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat mendorong kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial dan politik. Perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik saja, melainkan semakin banyak yang aktif terlibat dalam berbagai bidang, termasuk politik. Perkembangan fenomena demikian nampaknya juga sedang menggejolak di berbagai wilayah, termasuk di Sulawesi selatan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perempuan yang masuk di arena politik. Namun, satu hal yang menarik dicermati pada fenomena ini khususnya yang ada di Sulawesi selatan adalah para perempuan yang tampil memiliki genealogi kekerabatan dengan patron politik.

Tabel.1 Profil Politisi Perempuan di Sulawesi Selatan

No	Nama	Arena Kontestasi	Daerah Pemilihan	Kerabat Politik
1.	Fatmawati Rusdi	DPR RI 2024	Sulsel 1	Istri Rusdi Masse (Mantan Bupati Sidrap, Ketua DPW Nasdem Sulsel)
2.	Aliyah Mustika Ilham	DPR RI 2019-2024	Sulsel 1	Istri Mantan Walikota Makassar
3.	Indira Chunda Thita Syahrul	DPR RI 2019	Sulsel 1	Putri Syahrul Yasin Limpo

No	Nama	Arena Kontestasi	Daerah Pemilihan	Kerabat Politik
4.	Meity Rahmatia	DPR RI 2024	Sulsel 1	Pengusaha
5.	Liestiaty Fachrudin	Caleg DPR RI 2024	Sulsel 1	Istri Mantan Gubernur Sulsel (Nurdin Abdullah)
6.	A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal	DPRD Sulsel 2019-2024	Makassar	Istri Politisi Januar Jauri/Ponakan mantan Walikota Makassar
7.	Andi Debbie Purnama R.	DPRD Sulsel 2019-2024	Makassar	Istri Politisi Rusdin Abdullah
8.	Hasnah Syam	DPR RI 2019	Sulsel 2	Istri Bupati Barru
9.	Rezki Mulfiati Lutfi	DPRD Sulsel terpilih 2024	Makassar	Putri Wakil Bupati Soppeng
10.	Andi Tenri Abeng Salangketo	DPRD Sulsel Terpilih 2024	Sulsel 7	Anak PJ Bupati Bone
11.	Andi Tenri Indah	DPRD Sulsel terpilih 2024	Sulsel	Istri Anggota DPRD Sulsel (Bakal calon Bupati Gowa)
12.	Apiaty K Amin Syam	DPRD Kota Makassar	Makassar	Istri Alm. Mantan Gubernur Sulsel Amin Syam
13.	Indira Yusuf Ismail	Bakal Calon Walikota Makassar 2024	Makassar	Istri Walikota Makassar Sekarang (Dani Pomanto)
14.	Yariana Somalinggi	DPRD Sulsel	Tana Toraja	Istri Bupati Tana Toraja
15.	Agustina Mangande	Caleg DPR RI	Sulsel 3/Toraja Utara	Istri Bupati Toraja Utara
16.	Andi Azizah Irma Wahyudiyati	DPRD Sulsel	Pinrang	Putri Bupati Pinrang
17.	Andi Inas Utami Muchtar	Caleg DPRD Sulsel	Makassar	Putri Bupati Bulukumba
18.	Eva Stevany Rataba	DPR RI	Toraja Utara	Istri Wakil Bupati Toraja Utara 2016-2021
19.	Damayanti Batti	Caleg DPR RI	Toraja Utara	Istri Wakil Bupati Toraja Utara 2021-2024
20.	Hayarna Basmin	Caleg DPR RI	Sulsel 3/Luwu	Istri Bupati Luwu 2019-2024
21.	Putri Dakka	Caleg DPR RI	Sulsel 3/Luwu	Pengusaha
22.	Salmawati Paris	Caleg DPRD Provinsi	Jenneponto	Istri Wakil Bupati Jenneponto
23.	Maryani Ali	Caleg DPRD Provinsi	Selayar	Adik Bupati Selayar
24.	Erna Rasyid	Bakal Calon Walikota Pare-pare 2024	Pare-pare	Istri Walikota pare-pare
25.	Nurkanita Maruddani	Bakal Calon Bupati bantaeng	Bantaeng	Putri Ketua PAN Sulsel (Anggota DPR RI)
26.	Indah Putri Indriani	Bakal Calon Gubernur Sulsel 2024	Luwu Utara	Bupati Luwu Utara Sekarang dan Istri dari Bupati Luwu Utara 2010-2015

Sumber: Diolah Penulis dari Berita Media Cetak dan Online

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa notabene perempuan yang tampil dalam kontestasi politik di Sulawesi Selatan adalah kerabat dekat kelompok sosial yang memiliki klan politik. Mereka masih didominasi dari keluarga bupati, wakil bupati, walikota, atau sekaligus pengusaha. Selain itu, beberapa juga memiliki hubungan kekerabatan dengan mantan gubernur atau bupati dan walikota. Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa tidak sulit bagi mereka untuk membangun popularitas, dan jaringan sosial politik karena sudah dibekali dengan kekuatan yang ada. Meskipun latar belakang demikian tidak menjadi jaminan pasti dalam kemenangan setiap pertarungan. Namun faktanya sangat sedikit di antara mereka yang tidak terpilih dalam pencalonannya.

Latar belakang tersebut menjadi infrastruktur politik yang memadai dalam pencalonan mereka dalam berbagai kontestasi politik. Setidaknya beberapa modal dasar yang dibutuhkan dalam pertarungan politik sudah tersedia. Secara umum, nama-nama di atas tidak diragukan dari aspek modal ekonomi. Selain itu, modal sosial juga terbilang sangat baik karena adanya jaringan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok politik mereka. Popularitas dan kedekatan para kerabat politik mereka seperti suami seorang bupati, atau anak seorang walikota tentu memudahkan bagi mereka untuk mengakses fasilitas politik tertentu. Mereka lebih mudah mendapatkan akses pada partai politik untuk keperluan tertentu. Misalnya kebutuhan akan kendaraan politik, atau hal spesifik lainnya seperti penentuan nomor urut dalam pencalekan.

Kondisi tersebut semakin memudahkan ketika kedekatannya dengan struktur kekuasaan digunakan untuk membantu si anak ataupun istri dalam memobilisasi struktur kekuasaan untuk memenangkan mereka. Hal ini terjadi pada beberapa nama di atas berdasarkan pengakuan beberapa masyarakat yang ada pada daftar mereka. Biasanya mobilisasi kekuatan politik pada struktur birokrasi diikuti dengan sanksi-sanksi tertentu sebagai ancaman. Hal tersebut meskipun efektif namun seringkali menjadi sorotan publik karena bertentangan dengan prinsip dasar birokrasi. Kalau meminjam pendapat [Weber \(2019\)](#) sebenarnya para pejabat bersangkutan masih memperagakan sistem otoritas tradisional di dalam birokrasi modern.

Otoritas tradisional adalah sistem hubungan kekuasaan yang mendasarkan tindakannya pada legitimasi tradisional yang dilakukan secara turun-temurun. Tipe otoritas demikian terdapat pada masyarakat dengan sistem kerajaan atau adat ([Weber, 2019](#)). Di mana kekuasaan bisa diregenerasi melalui garis keturunan. Dari perilaku politik semacam itu, perlu dipahami sebagai patologi birokrasi karena dasar tindakannya tidak sesuai dengan konteks masyarakat modern saat ini. Sedangkan birokrasi merupakan organisasi sosial yang paling rasional di mana sistem hubungan kerja yang seharusnya adalah berdasarkan aturan yang legal dan prinsip profesionalisme.

Patriarkalisme: Politik Berkedok Tubuh Perempuan

Apa yang menjadi fakta di atas telah menunjukkan gejala eksklusivisme di bidang politik. Fenomena tersebut secara spesifik bisa juga disebut sebagai patrimonialisme dalam dunia politik dan dalam konteks tertentu menampilkan watak patriarkalisme politik. [Theobald \(1982\)](#) mendefinisikan Patrimonialisme sebagai bentuk pemerintahan di mana struktur birokrasi atau kekuasaan diisi oleh mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan. Apa yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan sebenarnya bisa dipahami sebagai patrimonialisme dengan wajah baru atau neopatrimonialisme. Hal ini karena relasi kekerabatan yang tradisional dipraktikkan dalam sistem politik dan birokrasi modern.

Berdasarkan data sebelumnya maka penting memeriksa lebih jauh dengan mengajukan kesangsian feminis. Barangkali kita perlu menguraikan bagaimana fakta-fakta kekerabatan menjadi indikator utama yang menentukan daya politik para perempuan tersebut. Dengan melihat bahwa jaringan sosial atau basis politik yang digunakan tidak lain adalah jaringan kekuasaan dari kerabat tersebut baik secara struktural maupun secara sosial lainnya. Selain itu, pengakuan beberapa masyarakat dan informasi yang penulis temukan di lapangan sehingga diketahui bahwa adanya operasi nama besar di balik para politisi perempuan. Sedangkan perempuan yang berasal dari latar pengusaha lebih banyak menggunakan modal ekonomi yang dioperasikan dengan berbagai macam cara.

Mode operasi tersebut bagi penulis adalah sama saja dalam konteks politik, keduanya bisa disebut nir feminisme. Keduanya sama-sama tidak mencerminkan kerja-kerja aktivisme dan gerakan perempuan sebagaimana yang diharapkan. Penulis memahami daya dorong dari tampilnya sosok perempuan dalam dunia politik tidak terlepas karena ambisi memperpanjang kekuasaan. Kecenderungan demikian tak lain adalah watak patriarki, di mana praktik didasari oleh motivasi kekuasaan.

Keterlibatan perempuan dalam politik tidak selalu mencerminkan keterwakilan yang substansial atau kualitatif ([Niron & Seda, 2020](#)). Meskipun ada peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam politik, tidak semua dari mereka memperjuangkan isu-isu gender secara mandiri. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik perlu dilihat lebih dalam, termasuk bagaimana proses pengalaman politik mereka. Selain itu penting juga mengetahui konteks latar belakang aktivisme perempuan tersebut sebagai rekam jejak keberpihakan pada isu gender dan politik yang inklusif.

Ketika dicermati secara seksama terkait figur perempuan yang muncul dalam kontestasi politik sering kali memiliki hubungan dengan kekuatan politik yang sudah mapan, terutama dalam bentuk ikatan keluarga. Terbukti pada tabel di atas diketahui begitu banyak kontestan politik perempuan adalah kerabat klan politik tertentu. Jones (2020) dalam penelitiannya mengidentifikasi bagaimana keluarga politisi yang kuat dapat mempengaruhi perekrutan dan representasi perempuan dalam politik.

Patriarkalisme menurut Weber (2019) ketika otoritas bertumpu pada kekuasaan personal dan birokrasi yang dijalankan oleh rumah tangga kerajaan, dimana kekuasaan tersebut secara formal bersifat sewenang-wenang dan berada di bawah kendali langsung penguasa. Praktik semacam ini biasanya akan menempatkan kepala keluarga laki-laki sebagai pusat otoritas, mencerminkan pola dominasi tradisional di mana perempuan sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan politik. Artinya selalu ada laki-laki yang mengendalikan setiap pengambilan keputusan politik perempuan.

Menurut Schochet (1988) Patriarkalisme merupakan sistem kekuasaan di mana laki-laki mengendalikan sumber daya politik. Patriarkalisme biasanya dioperasikan melalui kekuasaan politik oleh individu atau kelompok yang memperlakukan wilayah sebagai milik pribadi mereka atau sang laki-laki. Sehingga perempuan tidak lain hanyalah sumber daya yang sedang digunakan dengan berkedok partisipasi politik perempuan. Dalam beberapa kasus di atas, memanfaatkan kedudukan mereka dalam struktur patrimonial untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan politik.

Dalam sistem patriarkalisme, penguasa (laki-laki) tentu memiliki kontrol penuh atas sumber daya dan keputusan politik. Mereka mengelola wilayah kekuasaan tersebut seolah-olah itu adalah milik pribadi mereka, menggunakan kekuasaan politik untuk memperoleh manfaat pribadi atau kepentingan keluarga. Menurut Gobetti (2019) bahwa Patriarkalisme sering kali berkaitan dengan korupsi, nepotisme, dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, karena keputusan politik sering kali didasarkan pada hubungan personal atau koneksi pribadi, bukan pada kepentingan publik atau keadilan.

Weber (2019) menekankan bahwa baik patrimonialisme maupun patriarkalisme sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip rasional-legal yang mendasari masyarakat modern. Di dalam masyarakat yang berbasis pada hukum dan institusi yang kuat, kekuasaan politik seharusnya tidak dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu secara pribadi, melainkan dibatasi dan diatur oleh hukum yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, patriarkalisme justru bisa menghambat emansipasi perempuan di ranah publik. Meskipun pada permukaan seakan-akan perempuan sudah teremansipasi karena muncul di ranah publik. Padahal kemunculan itu merupakan sokongan laki-laki yang ingin memapankan kekuasaannya.

Dari sinilah penggunaan sudut pandang feminis sangat penting agar tidak terkecoh pada realitas permukaan. Selain itu, melalui pemikiran feminisme ini kita bisa membongkar struktur patriarki yang mendominasi dalam praktik pengusungan perempuan dalam kontestasi politik. Sebagaimana kita ketahui bahwa struktur patriarki selalu berupaya menghalangi partisipasi politik perempuan dalam arti yang sesungguhnya. Itulah sebabnya di tengah masyarakat yang masih kental budaya patriarkinya menjadi penting mencurigai bagaimana otentifikasi feminisme para perempuan tersebut. Sebagaimana menurut Jenkins & Reardon (2007) bahwa pembongkaran struktur patriarki merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil.

Kemunculan perempuan di ranah publik juga bisa dipahami sebagai panggung depan yang penuh kepura-puraan. Tindak-tanduk politisi perempuan di panggung depan tersebut tak lain hanyalah performativitas yang dramatik. Goffman menjelaskan bahwa performativitas sosial dapat dipahami bahwa di dalam panggung politik, perempuan seringkali menjalankan peran yang tampil di depan, namun di balik layar, terdapat figur laki-laki atau kekuatan patriarki yang sebenarnya mengendalikan dan mengatur peran yang dimainkan oleh perempuan tersebut (Maseda, 2017). Dengan kata lain, perempuan dalam politik seringkali menjadi instrumen yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan patriarki, sedangkan peran dominan dan kendali tetap dipegang oleh laki-laki atau struktur patriarki yang ada di belakang layar.

Oleh karena itu, representasi perempuan dalam politik bisa diartikan sebagai bentuk manipulasi atau kendali oleh laki-laki untuk memajukan agenda politik mereka. Ini bisa mengakibatkan perempuan diposisikan sebagai figur kuat secara visual, namun sebenarnya diatur atau dikendalikan oleh dominasi laki-laki, yang pada akhirnya dapat mengekspos politisi perempuan pada risiko eksposur negative.

Sebagaimana gagasan Goffman (2009) bahwa interaksi sosial sehari-hari seperti pertunjukan di atas panggung, di mana individu berperan sesuai dengan skrip sosial yang ada. Dalam konteks partisipasi perempuan dalam tulisan ini bisa dipahami bahwa apa yang kita saksikan tidak terlepas sebagai kemasam pertunjukkan oleh aktor utama yang berada di baliknya. Jadi, perempuan yang tampil melakukan peran-peran yang telah diakui secara sosial, seperti seorang ibu, peduli dan peka, serta ikhal simbolis lainnya, adalah scenario untuk menjembatani ekspektasi gender yang ada dalam masyarakat.

Kehidupan di balik panggung (*backstage*), kadang kala membuat individu dapat merasa lebih bebas untuk mengekspresikan identitas dan perasaan yang mungkin bertentangan dengan pertunjukan yang mereka lakukan di depan umum. Dalam hal ini *backstage* mengacu pada minat atau motivasi perempuan

yang bisa saja tidak menghendaki terlibat dalam politik. tetapi kemudian menjadi tumbal dari ambisi patriarki di lingkarannya. Misalnya seorang anak walikota, bupati, pejabat lainnya yang menghendaki adanya generasi yang melanjutkan genealogi klan politiknya. Artinya meskipun si perempuannya bisa memiliki kehendak politik yang mandiri namun tetap saja mereka tunduk pada laki-laki sebagai penulis skenarionya.

Goffman tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada interaksi antara individu. Artinya, interaksi sosial antara perempuan dan elemen-elemen lain dalam politik, seperti partai politik, media, dan masyarakat umum, juga berperan dalam membentuk pertunjukan politik perempuan. Bagaimana media meliput perempuan dalam politik atau bagaimana partai politik memainkan pertunjukan perempuan di arena social politik (Scheff, Phillips, & Kincaid, 2015).

Oleh karena itu, sangat relevan memahami kenyataan ini dalam konteks feminisme yang sifatnya fenomenologis, di mana peran dan perlakuan perempuan dalam politik perlu dilihat sebagai fakta permukaan dimana di baliknya terdapat bagian utamanya. Melalui feminisme juga kita bisa melangkah menuju pembebasan dari kendali patriarki. Feminisme menekankan urgensi memberdayakan perempuan untuk mengambil peran aktif dalam politik dan mewujudkan aspirasi mereka sendiri bukan memanfaatkannya (Brown, 2015). Melalui perspektif ini, perempuan dalam politik tidak seharusnya hanya menjadi representasi simbolis, tetapi harus memiliki kekuatan, autonomi, dan kapasitas untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik yang substansial.

Dengan menggunakan perempuan sebagai wajah utama dalam politik, patriarki menciptakan ilusi bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal kita berharap bahwa perwakilan perempuan benar-benar independen dan terlepas dari kendali patriarki. Pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ini mendukung transformasi menuju perwakilan gender yang lebih inklusif dan menghargai peran, aspirasi, dan kepentingan perempuan dalam dunia politik. Dalam dinamika ini perempuan mestinya memainkan peran sentral dalam menginisiasi dialog dan meningkatkan kesadaran tentang urgensi kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan politik. Walaupun itu dilakukan maka kembali lagi bahwa itu hanya pertunjukkan panggung depan. Selamanya yang diuntungkan adalah laki-laki di baliknya.

Partisipasi politik perempuan diakui sebagai hak asasi manusia yang harus ditegakkan dan didukung tanpa ada bentuk diskriminasi yang berlandaskan pada gender. Ini memberikan peluang bagi perempuan dari beragam latar belakang, terutama mereka di luar lingkaran politik yang sudah mapan, untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam mencapai posisi politik. Peran aktif perempuan dalam politik berkontribusi pada pluralitas representasi dalam pengambilan keputusan politik (Bacchi, 1999). Sering kali, perempuan membawa perspektif yang berbeda ke meja kebijakan dan lebih cenderung mempromosikan isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan, anak-anak, dan keluarga. Seperti yang ditegaskan Mayrudin, Nurrohman & Astuti (2022) bahwa keberadaan perempuan dalam ranah politik juga perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dan perwakilan beragam kepentingan.

Dengan pengalaman unik, pandangan, dan kepentingannya mestinya perempuan memegang peranan yang penting dalam proses pengambilan keputusan politik. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik sebagai upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat (Smith, 2018) (Wängnerud, 2009). Keterlibatan perempuan dalam politik perlu dibaca secara komprehensif guna mendorong kualitas sebagaimana yang diharapkan. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Termasuk bagaimana melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka bagi yang sudah pernah terpilih dan menelusuri latar belakang aktivisme yang lain bagi mereka yang baru.

Menurut Bullough et al (2012) bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi kepemimpinan politik perempuan perlu didasarkan pada evaluasi yang cermat. Banyak indikator yang mesti diperhatikan seperti; tingkat korupsi, ketidakseimbangan gender dalam pemberdayaan politik, alokasi anggaran publik untuk sektor pendidikan, kondisi ekonomi negara, aksesibilitas terhadap posisi kekuasaan dan sumber daya internet, derajat kebebasan politik yang diperoleh, serta variabel budaya seperti orientasi terhadap kinerja, tatanan kolektivisme, dan tingkat jarak kekuasaan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam politik, meskipun terlihat sebagai langkah menuju kesetaraan gender, sebenarnya tidak selalu menyiratkan kebebasan penuh dari pengaruh kuasa patriarki. Meskipun perempuan mungkin terlibat dalam berbagai aspek politik, dari perwakilan hingga keputusan pembuatan kebijakan, mereka masih harus berhadapan dengan dinamika patriarki yang ada dalam struktur politik dan masyarakat. Bourdieu mengartikan bahwa habitus yang terbentuk oleh pengaruh patriarki akan tetap berperan dalam membentuk pandangan dan tindakan perempuan dalam konteks politik (Mangez, 2015). Kemunculan perempuan dalam kontestasi politik sebenarnya bisa diartikan sebagai bagian dari strategi operasi patriarki yang bersifat subtil. Dalam hal ini, perempuan digunakan oleh struktur politik yang dikuasai oleh laki-laki atau kuasa patriarki untuk mencapai tujuan tertentu. Ini dapat mencakup penempatan perempuan dalam posisi publik sebagai simbol

keseimbangan gender atau peran politis, tetapi di balik layar, kontrol dan dominasi tetap berada pada aktor patriarki.

Sehingga keterlibatan perempuan dalam politik tidak selalu bisa dipahami dalam artian mewakili langkah menuju kesetaraan sejati. Alih-alih menghadirkan transformasi substansial dalam struktur politik dan dinamika kekuasaan, keterlibatan perempuan dalam politik sering kali mencerminkan wajah patriarki dalam mempertahankan kontrol mereka melalui peran-peran yang tampaknya kuat dan berwibawa. [Smith \(2018\)](#) juga meyakini bahwa penggunaan simbolisme perempuan dalam politik sering kali menjadi alat dalam mencapai tujuan patriarki yang lebih luas.

Apa yang ditemukan oleh [Bullough et al \(2012\)](#) adalah bahan refleksi politik kita, guna mendorong kesadaran feminis sebagai alat utama untuk memeriksa berbagai ketimpangan social politik dari actor patriarki. Melalui analisis feminis, sejak awal penulis memiliki kecurigaan besar terhadap kemunculan beberapa figure perempuan di kancah politik. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam politik tidak menjamin mereka terbebas dari kerangkeng kuasa patriarki. Mempertimbangkan ketajaman observasi dan kedalaman analisis maka penulis menegaskan bahwa pada umumnya perempuan yang muncul dalam kontestasi politik adalah operasi patriarki yang berkedok tubuh perempuan. Perempuan terlibat dalam politik sebagai anggota keluarga bupati, mereka seringkali menjadi perpanjangan dari patriarki dan patrimonialisme. Dalam struktur patriarki, perempuan diharapkan untuk mendukung dan memperkuat kekuasaan laki-laki dalam keluarga mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan aspirasi atau kepentingan pribadi mereka dalam politik.

Pada dasarnya perempuan dalam situasi ini tidak hanya menjadi objek yang dipengaruhi oleh patriarki dan patrimonialisme, tetapi juga sebagai agen yang dapat mengkokohkan keberadaan kekuasaan. Dalam konsep impression management Goofman perempuan memperagakan citra yang sesuai dengan harapan masyarakat tentang bagaimana seorang perempuan seharusnya bertindak atau terlihat ([Graw, 2003](#)). Dalam konteks analisis ini, maka perempuan juga menjadi satu bagian yang memainkan peran dalam mendukung kepentingan patriarki. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan kepentingan publik atau keadilan sosial. Dengan demikian, mereka menjadi perpanjangan dari sistem patrimonial yang memanipulasi atau memanfaatkan tubuh perempuan sebagai citra maupun instrumen dalam politik. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa realitas perempuan dalam arena politik perlu dilampaui secara fenomenologis. Di mana perempuan yang menampak di dunia publik selalu menutupi kenyataan adanya kekuatan patriarki yang bekerja di baliknya.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa perempuan yang muncul dalam kontestasi politik sebagian besar adalah kerabat penguasa atau pengusaha di wilayah sulawesi selatan. Selain itu peneliti tidak menemukan latar belakang aktivisme mereka dalam memperjuangkan isu maupun persoalan perempuan. Berdasarkan profil dan kerja-kerja politik perempuan yang dimaksud sehingga penulis meyakini bahwa mereka adalah bagian dari operasi politik patriarki. Dimana ada kekuatan nama besar keluarga di bekalangnya: istri, anak, saudara, menantu, atau ponakan dari pejabat atau pemilik modal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa munculnya perempuan dalam dunia politik tidak lain adalah perpanjangan tangan dari kelompok dominan (laki-laki) dalam upaya melanggengkan kekuasaannya.

Penelitian ini bisa memantik lahirnya kesadaran kritis bagi publik khususnya dalam menentukan pilihan politik. Penelitian ini memberikan alternatif cara memahami realitas terkait keterlibatan politik perempuan yang begitu kompleks. Cara pandang demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kesadaran politik bagi warga. Kesadaran politik bagi peneliti merupakan modal kolektif dasar yang dibutuhkan untuk mendorong perbaikan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, tulisan ini juga bermakna sebagai satu intrupsi terhadap praktik penyalagunaan tubuh dan citra perempuan dalam melanggengkan kekuatan patriarki.

Daftar Pustaka

- Anto, R. P. et al. (2023). *Perempuan, Masyarakat, dan Budaya Patriarki*. Sukoharjo: Penerbit Tahta Media.
- Aulya, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2022). Perempuan dan politik: Menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. *Amanna Gappa*, 126–136.
- Bacchi, C. L. (1999). *Women, policy and politics: The construction of policy problems*. London: Sage Pub.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Dan DPRD (Persen), 2014-2019*. Jakarta Pusat: BPS RI.

-
- Bari, F. (2005). Women's political participation: Issues and Challenges. United Nations Division for the Advancement of Women Expert Group Meeting: Enhancing Participation of Women in Development through an Enabling Environment for Achieving Gender Equality and the Advancement of Women. Bangkok, 393.
- Barnett, C., & Shalaby, M. (2024). All Politics is Local: Studying Women's Representation in Local Politics in Authoritarian Regimes. *Politics & Gender*, 20(1), 235–240.
- Brown, W. (2015). *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*. MIT Press.
- Bullough, A., Kroeck, K. G., Newbury, W., Kundu, S. K., & Lowe, K. B. (2012). Women's political leadership participation around the world: An institutional analysis. *The Leadership Quarterly*, 23(3), 398–411.
- Gardiner, R. (2016). Gender, authenticity and leadership: Thinking with Arendt. *Leadership*, 12(5), 632–637.
- Gobetti, D. (2019). Patriarchalism. In *Private and Public* (pp. 44–65). UK: Routledge.
- Goffman, E. (2009). *Relations in public*. UK: Transaction Publishers.
- Jenkins, T., & Reardon, B. A. (2007). Gender and peace: Towards a gender-inclusive, holistic perspective. In *Handbook of peace and conflict studies* (pp. 209–231). UK: Routledge.
- Jones, L. (2020). Family Connections and Women's Political Participation. *Political Research Quarterly*, 73(1), 141–155.
- Jones, M. P. (2004). Quota legislation and the election of women: Learning from the Costa Rican experience. *The Journal of Politics*, 66(4), 1203–1223.
- KPU Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Daftar Calon Tetap (DTC) Pemilihan Legislatif tahun 2024 DPRD Sulawesi Selatan*. Makassar: KPU Sulawesi Selatan.
- Kumar, D. P. (2017). Participation of women in politics: Worldwide experience. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(12), 77–88.
- Lotulung, L. J., & Mulyana, D. (2018). Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Utara. *Sosiohumaniora*, 20(2), 138–144.
- Mangez, E. (2015). Bourdieu's Theory of Social Fields. UK: Routledge.
- Maseda, R. V. (2017). *Deciphering Goffman: The structure of his sociological theory revisited*. UK: Taylor & Francis.
- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *Ijd-Demos*, 4(3), 1071–1090.
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi politik perempuan pada lembaga legislatif (Studi tentang pencalonan perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019). *Aristo*, 9(2), 203–228.
- Scheff, T. J., Phillips, B. S., & Kincaid, H. (2015). *Goffman unbound!: A new paradigm for social science*. UK: Routledge.
- Schochet, G. J. (1988). *The Authoritarian Family and Political Attitudes in 17th-Century England: Patriarchalism in Political Thought*. Transaction Publishers.
- Sidik, P. (2022). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Indonesia Perspektif Legal Feminism. *At-Tanwir Law Review*, 2(1), 90–101.
- Skjeie, H., & Teigen, M. (2005). Political constructions of gender equality: Travelling towards... a gender balanced society? *Nordic Journal of Women's Studies*, 13(03), 187–197.
- Smith, A. (2018). Women and Political Power: Past, Present, and Future. *Journal of Gender Studies*, 27(6), 654–667.
- Sutton, J., & Austin, Z. (2015). Qualitative research: Data collection, analysis, and management. *The Canadian Journal of Hospital Pharmacy*, 68(3), 226.
- Theobald, R. (1982). Patrimonialism. *World Politics*, 34(4), 548–559.
- Trisnani, A., Windiarti, W., & Sa'adah, H. (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2), 209–228.
- Wängnerud, L. (2009). Women in parliaments: Descriptive and substantive representation. *Annual Review of Political Science*, 12, 51–69.
- Weber, M. (2019). *Economy and society: A new translation*. UK: Harvard University Press.
-